



NOMOR : 21

TAHUN 2014

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah ... 3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah ... 4

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

7. Indikator ... 5

7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2014-2018 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.
- (2) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka wajib menggunakan Indikator Kinerja Utama untuk :

- a. menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV
PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 5

Bupati dan Kepala SKPD sesuai kewenangannya melakukan :

- a. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama;
- b. Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATIMAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003

Lampiran : Peraturan Bupati Majalengka
Nomor : 20 tahun 2014
Tanggal : 31 Desember 2014
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

VISI : MAJALENGKA MAKMUR

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN	
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan	1 Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan	1 Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	IPM = 1/3 (X(1) +X(2) + X(3), dimana : X(1) = Indeks harapan hidup X(2) = Indeks Pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah) X(3) = Indeks standar hidup layak	71,82*	72,79	73,71	74,70	75,72	76,81	76,81	DISDIK	1 Pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka Pelaksanaan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun	1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
				2 Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	7,39*	7,77	8,14	8,55	8,96	9,47	9,47	DISDIK	2 Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar dan menengah	2 Program Pendidikan Menengah
				3 Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ Dimana : LIT15+t = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun ke atas) pada tahun t L 15+t = jumlah penduduk (usia 15 tahun ke atas) yang bisa menulis pada tahun t P15+t = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	95,84*	98,14	98,72	99,30	99,55	99,80	99,80	DISDIK	3 Perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas 4 Penguatan budaya baca dan gemar membaca masyarakat	3 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4 Program pembinaan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
				4 Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar	Per sepuluh ribu penduduk	$\frac{(jumlah\ sekolah\ (SD/MI + SMP/MTs))}{jumlah\ Penduduk\ Usia\ (7s.\ d12)thn + (13s.\ d15)thn} \times 10.000$	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	DISDIK		
				5 Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah	Per sepuluh ribu penduduk	$\frac{(jumlah\ sekolah\ (SMA/MA/SMK))}{jumlah\ Penduduk\ Usia\ (16 - 19)thn} \times 10.000$	0,14	0,30	0,46	0,61	0,77	0,93	1,08	DISDIK		
				6 Prosentase bangunan sekolah pendidikan dasar dalam kondisi baik	Persen	$\frac{Jumlah\ sekolah\ pendidikan\ SD/MI\ kondisi\ bangunan\ baik}{Jumlah\ seluruh\ sekolah\ SD/MI} \times 100\%$	76	78	80	82	84	86	86	DISDIK		
				7 Prosentase bangunan sekolah pendidikan menengah dalam kondisi baik	Persen	$\frac{Jumlah\ sekolah\ pendidikan\ SMP/MT's\ dan\ SMA/SMK/MA\ kondisi\ bangunan\ baik}{Jumlah\ seluruh\ sekolah\ SMP/MT's\ dan\ SMA/SMK/MA} \times 100\%$	74	76	78	80	82	84	84	DISDIK		
			2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	$\frac{(jumlah\ guru\ berijazah\ kualifikasi\ S1/D - IV)}{jumlah\ guru\ SD/MI, SMP/MT's, SMA/SMK/MA} \times 100\%$	75,75	85,00	96,61	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIK	1 Peningkatan kualitas pendidikan minimal S1/D4 serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah dilatih	1.494	900	100	100	50	50	1200	DISDIK	2 Peningkatan pendidikan usia dini, non formal dan informal.	2 Program Pendidikan Anak Usia Dini
				3 Rasio Guru terhadap murid	poin	$\frac{Jumlah\ guru}{Jumlah\ murid} \times 10.000$	1:20	1:21	1:22	1:23	1:24	1:25	1:25	DISDIK		3 Program Pendidikan Non Formal
			3 Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana Kesehatan pada seluruh wilayah Kab. Majalengka	1 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	Rasio	Jumlah puskesmas dan Puskesmas Pembantu dibagi jumlah penduduk kali 1000	0,0893	0,0893	0,0893	0,0901	0,0910	0,0910	0,0910	Dinkes	Peningkatan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan miskin.	1 Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN																									
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM																								
					2	Jumah puskesmas PONED	Unit	Jumlah puskesmas yang mampu memberikan pelayanan ObstetriNeonatal Emargency dasar (PONED)	22	26	27	28	28	28	Dinkes			2	Program Kesehatan Dasar yang Berkelanjutan dan Berkualitas																					
					3	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	Rasio	$\frac{jumlah\ rumah\ sakit}{jumlah\ Penduduk} \times 1000$	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026			RSUD Cideres/RSUD Majalengka	3	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata																				
					4	Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan	1	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	Jumlah puskesmas yag terakreditasi berdasarkan penilaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1	6	6	6	6			7	32	Dinkes	1	Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan;	1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																
							2	Tersedianya SOP sistem Rujukan	Dokumen	Jumlah Dokumen standar Operasional Prosedur (SOP) tentang sistem rujukan	3	3	3	3	3			3	3	Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka	2	1.4.1.2. Peningkatan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kesehatan;	2	Program Peningkatan Cakupan Peserta JKN																
							3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	Persentasi masyarakat miskin yang tercover pelayanan kesehatan	66,98	83,49	100	100	100			100	100	Dinkes	3	1.4.1.3. Peningkatan ketersediaan dan pelayanan informasi kesehatan;	3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
					5	Menurunnya AKI dan AKB																			4	1.4.2.1. Perluasan cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin.	4	Program Pelayanan Kesehatan Dasar												
																									5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan														
																									6	Program Peningkatan Poned dan Ponek														
																									7	Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan														
																									8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin														
																									1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Harapan hidup seseorang sejak lahir sampai tahun tertentu	67,13*	67,52	67,91	68,29	68,67	69,04	69,04	Dinkes	1	Peningkatan cakupan Desa Siaga Aktif	1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
																									2	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	Jumlah desa yang termasuk kriteria Desa Siaga Aktif	70	75	74	76	78	80	80	Dinkes	2	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	2	Program Peningkatan Lingkungan Sehat
					3	Cakupan Tatanan Rumah Tangga ber- PHBS	Persen	Persentasi rumah tagga yag sudah melaksanakan Peilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	55	56	57	58	59	70	70			Dinkes	3	Akselerasi penurunan angka kematian ibu dan bayi.	3	Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Masyarakat (Prohisan)																		
					4	AKI per 100.000 KH	Poin	Jumlah ibu meninggal akibat kehamilan atau persalinan dibagi jumlah kelahiran hidup X 100.000	137,97	≤ 136,24	≤ 134,51	≤ 132,78	≤ 131,05	≤ 129,32	≤ 129,32			Dinkes	4	Pemberian makanan tambahan penyuluhan dan Pemberian makanan tambahan pemulihan.	4	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan bayi (di bab 8 anak)																		
					5	AKB per 1.000 KH	Poin	Jumlah bayi usia 0 – 12 bulan yang meninggal dibagi jumlah kelahiran hidup kali 1000	11,6	≤ 10,76	≤ 10,16	≤ 9,56	≤ 8,96	≤ 8,36	≤ 8,36			Dinkes	5	Memperluas jangkauan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.	5	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita																		
					6	Balita Gizi Buruk	Persen	Jumlah balita usia 0-5 tahun yang mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02			Dinkes	6	Peningkatan sistem informasi dan Surveillance Epidemiologi yang evidence base	6	Program Keluarga Berencana																		
					7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	Persen	Persentasi desa/kelurahan yang mencapai target Universal Child Immunization (UCI) untuk pelayanan imunisasi dasar lengkap	95,33	96,21	97,10	97,96	98,83	100	100			Dinkes			7	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat																		
																					8	Program Pelayanan Kontrasepsi																		
																					9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat																		

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN						
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM					
																	10	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit			
			6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM kesehatan	1	Pendidikan formal bagi dokter spesialis (medis)	Orang	Jumlah dokter spesialis yang mengikuti pendidikan atau pelatihan formal	7	3	3	7	9	9	9	BKD/Dinkes/ RSUD Cideres/ RSUD Majalengka	1	Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya.	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
					2	Pendidikan formal bagi tenaga non medis (perawat, bidan, nutrisisionis, dll)	Orang	Jumlah tenaga paramedis (perawat, bidan, nutrisisionis, dll) yang mengikuti pendidikan atau pelatihan formal	13	5	5	31	40	45	45	BKD/Dinkes/ RSUD Cideres/ RSUD Majalengka	2	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumahsakit, puskesmas/pustu dan jaringannya.	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
					3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	Poin	Jumlah Dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi dibagi jumlah penduduk X 1000	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	BKD/Dinkes/ RSUD Cideres/ RSUD Majalengka					
					4	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 penduduk	Poin	Jumlah tenaga kesehatan lain (bidan, perawat, perawat gigi, apoteker, teknisi kefarmasian, sarjana kesehatan masyarakat, sanitarian, nutrisisionis, keterampilan fisik dan keteknisian medis) dibagi jumlah penduduk X 1000	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	BKD/Dinkes/ RSUD Cideres/ RSUD Majalengka					
		2	Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas, proporsional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	7	Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat	1	Kondisi Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	$\frac{\%target\ jalan + \%target\ jembatan}{200\%}$	85,77	87,13	88,73	90,62	92,36	94,61	94,61	Dinas BMCK	1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang telah ada	1	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
					2	Penambahan infrstruktur jalan dan jembatan	%	$\frac{\%target\ jalan + \%target\ jembatan}{200\%}$	0,00	0,00	0,00	0,14	0,28	0,28	0,28	0,28	Dinas BMCK	2	.Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	2	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
					3	Jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	$\frac{\sum Ketersediaan\ air\ irigasi\ (lt/det) pada\ setiap\ musim\ tanam}{\sum Kebutuhan\ air\ irigasi\ (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam} \times 100\%$	67,00	68,33	70,00	72,33	73,67	75,00	75,00	psdape	3	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan irigasi	3	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	
					4	Rumah tidak layak huni	%	$\frac{\% tahun\ n}{15,10\%} \times 7.508\ unit$	15,10	13,50	10,33	7,15	3,97	0,00	0,00	0,00	Dinas BMCK	4	Peningkatan efektivitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
					5	Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik	%	Cakupan pelayanan sanitasi meliputi MCK, MCK++, Drainase, serta Air bersih	83,51	86,50	90,00	93,50	97,00	100,00	100,00	100,00	Dinas BMCK	5	Penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan peningkatan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	5	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
					6	Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik	%	$\frac{Rumah\ berlistrik}{Jumlah\ rumah} \times 100\%$	90,51	91,07	91,64	92,20	92,77	93,33	93,33	93,33	Dinas PSDAPE	6	Peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6	Program pembangunan jalan dan jembatan
					7	Jumlah desa yang dapat diakses angkutan umum	%	Jumlah desa yang dapat diakses angkutan umum	65	70	75	80	85	90	90,00	90,00	Dinas BMCK	7	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sanitasi dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat.	7	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
																	8	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	8	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
																	9	Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan mengendalikan penggunaan air tanah	9	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN					
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM				
																		10	Program pengembangan perumahan	
																		11	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
																		12	Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
																		13	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
																		14	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	
																		15	Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan	
																		16	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Air Tanah	
			8	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana	1	Pemenuhan RTH	%	Jumlah RTH yang dipenuhi dalam satu tahun dibagi Jumlah RTH yang seharusnya dikalikan seratus persen	9,10	18,65	39,00	59,30	79,60	100,00	100,00	BPLH	1	Pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Majalengka	1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
					2	Luas lahan kritis yang ditangani	Ha	Rumus perhitungan = luas lahan kritis eksisting dikurangi luas/angka rehabilitasi	10458,05	1.000	600	600	600	600	7.058,05	Dinas HUTBUNAK	2	Pemantapan pemenuhan AMDAL dalam proses penetapan ijin usaha dan penegakan hukum lingkungan	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
					3	Penanganan dan Pengelolaan Persampahan	%	Volume sampah yang ditangani di bagi volume produksi sampah seluruhnya dikalikan seratus persen	20	26	32	38	44	50	50	BPLH	3	Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah	3	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
					4	Upaya pelestarian lingkungan	%	Jumlah capaian kinerja masing -masing kegiatan dibagi target kinerja seluruhnya dikalikan seratus persen	16,97	19,27	39,45	59,63	79,81	100	100	BPLH	4	Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
					5	Penanganan Kebencanaan Pra bencana	%	$\sum = \frac{Jumlah\ target\ sasaran\ 1\ tahun}{jumlah\ target\ sasaran\ 5\ tahun} \times 5\ tahun$	20	20	20	20	20	20	20,00	BPBD	5	Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan.	5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
					6	Penanganan Kebencanaan Saat Bencana	%	$\sum = \frac{Jumlah\ target\ sasaran\ 1\ tahun}{jumlah\ rata - rata\ target\ sasaran\ 5\ tahun} \times 5\ tahun$	50	50	50	60	60	65	65	BPBD	6	Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6	Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana
					7	Penanganan Kebencanaan Pasca Bencana	%	$\sum = \frac{Jumlah\ target\ sasaran\ 1\ tahun}{jumlah\ realisasi\ pencapaian\ target\ sasaran\ 1\ tahun} \times 5\ tahun$	100	100	100	100	100	100	100	BPBD	7	Pemenuhan Tanggap Darurat Bencana	7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
					8	Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL	%	$\frac{Dok.\ RDTR\ yang\ disusun + Dok.\ RBTl\ yang\ disusun}{Target\ akhir\ (14\ Dokumen)} \times 100\%$	2.500	5.833	8.333	8.889	9.444	10.000	10.000	BMCK	8	Rehabilitasi dan Rekonsruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	8	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
																	9	Pengintegrasian layanan transportasi pada pusat-pusat daerah pertumbuhan.	9	Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
																	10	Pemantapan dan Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan.	10	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
																	11	Peningkatan pengawasan kendaraan angkutan umum dan pengendalian lalu lintas.	11	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN					
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM				
															12	Pemantapan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.	12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
															13	Penataan dan pengendalian ruang	13	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		
															14	Penataan Dan Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Serta Jasa Konstruksi	14	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		
																	15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
																	16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
																	17	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika		
																	18	Program Perencanaan Tata Ruang		
																	19	Program Pemanfaatan Ruang		
																	20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
																	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
																	22	Program Pengembangan Data / Informasi Bangunan Gedung		
																	23	Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi		
																	24	Program Perencanaan Bangunan Gedung		
																	25	Program Pembangunan Bangunan Gedung		
																	26	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung		
																	27	Program Pengendalian Bangunan Gedung		
																	28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		
		3	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inclusive growth).	1	Terwujudnya pasar tradisional yang representatif	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi	4	1	1	1	1	1	4	Dinas KUKM Perindag	1	Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa.	1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
																	2	Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan.	2	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN	
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM
															3 Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis.	3 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
															4 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
			2	Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian.	Jumlah outlet yang dibangun	Lokasi	Jumlah outlet yang dibangun	3	0	5	5	5	5	23 Dinas KUKM Perindag	Penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sektor ekonomi.	Program Pembangunan Kawasan Perdagangan
2	Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur.	1 Peningkatan tatakelola pemerintahan menuju pemerintah yang profesional.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah	1 OPD dan UPP dengan nilai IKM kriteria minimal "B"	Persen	Jumlah OPD dan UPP dengan nilai IKM kriteria minimal "B"	90	100	100	100	100	100	100	Bag.Organisasi Setda	1 Penataan struktur organisasi yang proporsional;	1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
				2 Capaian Nilai SAKIP Pemda	Nilai	Hasil Evaluasi Sakip Pemda oleh Kementerian PAN RB	C	C	C	CC	CC	B	B	Inspektorat	2 Peningkatan pelayanan administrasi organisasi;	2 Program pelayanan administrasi perkantoran
				3 Pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat PIM sesuai jenjangnya	Persen	Jumlah Pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat PIM sesuai jenjangnya	61	62	67	72	73	74	74	BKD	3 Percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat;	3 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
				4 Tingkat perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	Rata-rata antara prosentase capaian implementasi RKPD dan prosentase pemenuhan laporan evaluasi Renja OPD	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda	4 Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah;	4 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
				5 Pemenuhan kebutuhan data/ informasi	Persen	Prosentase pemenuhan data/informasi perencanaan pemabngunan	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda	5 Peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan potensi;	5 Program Penggalan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
				6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Milyar	Jumlah realisasi PAD dalam satu tahun	138	154	219	385	611	924	924	DPKAD	6 Mewujudkan tertib administrasi aset daerah;	6 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
															7 Peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tatakelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	7 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
															8 Tertib administrasi pertanahan.	8 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan
															9 Mewujudkan pengelolaan kearsipan yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	9 Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
															10 Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	10 Program Pembinaan , Pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan
															11 Peningkatan kualitas perencanaan daerah.	11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
															12 Peningkatan pengelolaan data pembangunan.	12 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
															13 Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	13 Program Perencanaan Sosila Budaya
																14 Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah
																15 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
																16 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN	
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM
																17 Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
																18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
																19 Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah
																20 Program Penataan Administrasi Kependudukan
		2 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pemerintahan dalam rangka peningkatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat	Orang	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat	1.832	239	250	275	300	325	3.221	BKD	1 Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah; 2 Pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah.	1 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		3 Meningkatkan stabiitas keamanan daerah.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum	1 Jumah Demo	Kali	Jumlah demonstrasi yang terjadi dalam satu tahun	12	4	6	8	10	12	12	Satpol PP	1 Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.	1 Program penataan peraturan perundang- undangan, kesadaran hukum dan HAM
				2 Angka Kriminalitas	Poin	$\frac{\text{Jumlah tindakan kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10000$	202	207	187	200	205	218	218	Satpol PP	2 Peningkatan penyalarsan peraturandaerah.	2 Program penataan peraturan perundang- undangan, kesadaran hukum dan HAM
				3 Partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada	Persen	Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dibagi dengan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dikalikan seratus persen.	72	76,12	-	-	-	80	80	Bagian Tata Pemerintahan	3 Peningkatanpemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia (HAM).	3 Program penataan peraturan perundang- undangan, kesadaran hukum dan HAM
														4 Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP, satuan perlindungan Masyarakat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).	4 Program Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
3	Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat	1 Meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi	Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$	4,80*	5,30	5,50	5,80	6,30	6,50	6,50	Bappeda	1 Menjamin kepastian investasi.	1 Program Pegembangan Investasi
				2 Daya beli	Rp	$PPP/unit = Ri = \frac{\sum_{j=1}^{27} E(i,j)}{\sum_{j=1}^{27} P(i,j)Q(i,j)}$ Dimana : E(i,j) = pengeluaran untuk komoditi j kabupaten i P(i,j) = harga komoditi j di kabupaten i Q9i,j) = jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten ke i	641,01*	648,04	652,64	657,47	662,62	667,65	667,65	Bappeda	2 Menyiapkan kawasan industri	2 Penanaman Modal
				3 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00	Pelaku Usaha	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp.500.000.000,00	157	27	30	33	36	39	165	BPPTPM		
				4 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00	Milyar Rp.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp500.000.000,00	430,98	139,05	146,00	153,30	160,97	169,02	768,34	BPPTPM		
				5 Jumlah Investor UMKM	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku Investor UMKM	1.168	600	600	600	600	600	4.168	BPPTPM		
				6 Nilai Investasi UMKM	Milyar Rp.	Realisasi Nilai Investasi UMKM	331,67	339,47	300	300	300	300	1.871	BPPTPM		
		2 Peningkatan daya saing KUMKM berbasis potensi lokal	Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM	1 Jumlah UMKM	UMKM	Jumlah UMKM yang melakukan usaha	25.437	26.963	28.581	30.296	32.114	34.040	34.040	KUKM Perindag	1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM;	1 Program Pengembangan Koperasi dan UKM

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN				
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM			
				2	Persentase Usaha Kecil dan Usaha Menengah	%	Persentase target kenaikan jumlah UMKM per tahun	6	6	7	8	9	10	10	KUKM Perindag	2	Peningkatan akses teknologi, SDM, pasar,kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM.	2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
				3	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor UMKM	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di Sektor UMKM	102.147	613	715	817	919	1.021	106.232	KUKM Perindag	3	Penguatan koperasi pondok pesantren.	3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
																4	Peningkatan kinerja dan daya saing BUMD dan lembaga keuangan lainnya.	4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
																		5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
																		6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
																		7	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
																		8	Program Peningkatan Kehidupan Beragama
																		9	Program Peningkatan Kualitas Koperasi
																		10	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
																		11	Program Pembangunan Ekonomi
4	Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan.	1 Memantapkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan	1	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Target SPM ketahanan pangan untuk cadangan pangan pemerintah adalah 60 % dari 100 ton jadi pada kondisi akhir sama dengan 60 ton	0	0	0	20	20	20	60	BP4K	1	Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi dan penanganan daerah rawan pangan.	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan
				2	Ketersediaan Pangan (LPM)	Unit	Target 1 desa : 1 LPM Total: 343 desa/kel dikarenakan anggaran yang kurang memadai, sehingga untuk sementara selama 5 tahun dapat tercapai 180 LPM	80	20	20	20	20	20	180	BP4K	2	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan.	2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
				3	SLPTT	Kelompok	Target 10 unit SLPTT dalam 1 tahun	2	10	10	10	10	10	52	Distankan /BP4K	3	Peningkatan bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).	3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
																4	Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan.	4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
																5	Pengembangan usaha, sarana prasarana pengolahan, serta pemasaran produk pertanian, perkebunan dan peternakan.	5	Peningkatan kesejahteraan petani
																6	Pemberian intensif dan disinsentif.	6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN	
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM
															7 Peningkatan produksi perikanan; 8 Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan; 9 Peningkatan pengembangan aneka usaha kehutanan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; 10 Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan konservasi sumber daya hutan. 11 Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan konservasi sumber daya hutan.	7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 9 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 10 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian 11 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 12 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 13 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 14 Program Peningkatan Sarana Prasarana Hasil Perikanan 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 17 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
		2 Meningkatkan destinasi wisata	Terwujudnya destinasi wisata unggulan	1 (1) Jumlah Destinasi Wisata 2 (2) Jumlah Kunjungan Wisata	5 124.918	Jumlah Destinasi Wisata yang dibangun <i>Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se – Kabupaten dan Kota</i> <i>Jumlah seluruh kunjungan wisata se – Kabupaten dan Kota</i> X 100%	-	-	1	1	1	8	8	Disporabudpar	1 Pembangunan dan pengembangan pariwisata unggulan; 2 Peningkatan kualitas sarana prasana pariwisata; 3 Peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.	1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3 Program Pengembangan Kemitraan
		3 Mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor , dan pro- environment	Jumlah Kawasan Industri Potensi Daerah	Kawasan	Jumlah Kawasan Industri Potensi Daerah	5	1	0	1	0	1	8	Dinas KUKM Perindag	Penataan Kawasan Industri Produk Unggulan Potensi Daerah.	Program Pengembangan Kawasan Industri Potensi Unggulan Daerah
		4 Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya peran gender dalam pembangunan	1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen Persen	Jumlah penduduk perempuan dilembaga pemerintah dibagi jumlah penduduk perenpum dikalikan seratus persen Jumlah penduduk perempuan dilembaga swasta dibagi jumlah penduduk perenpum dikalikan seratus persen	44,69	1	1	1	1	1	49,69	BPMDPKB	1 Penguatan regulasi kelembagaan kesetaraan gender; 2 Penyediaan kebutuhan aktivitas kelembagaan kesetaraan gender.	1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI								PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN				
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN		PROGRAM				
																		4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
		5	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera	1	Kemiskinan	Persen	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus persen (Prosentase angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS)	14,11*	12	11	9	7	5	5	Bappeda	Penyediaan alat kontrasepsi dan peningkatan kesejahteraan pada keluarga prasejahtera dan sejahtera I.	1	Program Keluarga Berencana	
					2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rasio	Rata-rata jumlah anak dibagi jumlah keluarga	1,22	1,20	1,18	1,16	1,14	1,12	1,12	BPMDPKB			2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
					3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	Rata-rata prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahttera I	33,61	31,28	29,48	27,68	25,88	24,08	24,08	BPMDPKB			3	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
																		4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	
																			5	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
																			5	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
																			7	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD
		6	Meningkatnya kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	Prosentase jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	33	3	3	3	3	3	48	Dinsosnaker-trans	Perluasan program perlindungan sosial bagi para PMKS.	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
																	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
																	3	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		
																	4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
																	5	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma		
																	6	Program Pelestarian Nilai- Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan		
7	Program Pendataan PMKS																			
															8	Program Pembinaan Lingkungan Sosial				
7.	Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan	1	Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	$\frac{Jumlah\ penganggur\ terbuka\ usia\ angkatan\ kerja}{Jumlah\ penduduk\ usia\ angkatan\ kerja} \times 100\%$	7,35*	6,74	4,74	4,24	3,99	2,25	2,25	Dinsosnaker-trans	1	Pelaksanaan pelatihan/kursus bagi calon tenaga kerja dan perlindungan bagi para tenaga kerja.	1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
				2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja dikalikan serattus persen	20	5	20	15	10	10	80	Dinsosnaker-trans	2	Perluasan lapangan pekerjaan.	2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				3	Pencari kerja terdaptar yg di tempatkan	Persen	$\frac{Jumlah\ pencari\ kerja\ yang\ ditempatkan}{Jumlah\ pencari\ kerja\ yang\ mendaftar} \times 100\%$	27	2	2	2	2	2	37	Dinsosnaker-trans			3	Program Pengelolaan Data Ketenagakerjaan	

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN								
			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM							
			2	Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	$\frac{Jumlah\ sengketa\ pengusaha\ pekerja}{Jumlah\ perusahaan} \times 1000$	35,40	31,86	28,32	24,78	21,24	17,70	17,70	Dinsosnaker-trans		Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			
		8	Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga.	Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga	1	Jumlah kompetisi olah raga	Kali	Jumlah kompetisi olah raga	5	7	7	8	8	8	8	8	Disporabudpar	1	Peningkatan pembangunan sarana prasarana olah raga dan pembinaan olahragawan.	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		
		9.	Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	Jumlah Pemuda Pelopor	4	4	4	4	4	4	24	Disporabudpar	2	Peningkatan keterampilan pemuda.		2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
																				4	Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda		
																				5	Program peningkatan peran serta kepemudaan		
																				6	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		
5	Mewujudkan Desa Mandiri	Memperkuat Pemerintahan Desa dan Memberdayakan Masyarakat Desa	Kuatnya Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Jumlah desa Mandiri	Desa	Hasil perkembangan tiap tahun dari indikator : Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, kapasitas aparatur, kelembagaan masyarakat, sarana prasarana, keuangan desa, pemberdayaan masyarakat dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan	3	4	4	4	5	6	26	BPMDPKB/ Bappeda	1	Peningkatan kapasitas kelembagaan, keuangan, aparatur, sarana dan prasarana;	1	Program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa				
				2	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Ribu Rupiah	Tenaga, konsumsi dan material lainnya yang berasal dari masyarakat lokasi sasaran kegiatan yang bersifat pemberdayaan	661.364	681.204	701.045	720.886	740.727	760.568	760.568	BPMDPKB	2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal.	2	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				
				3	Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Buah	PERDA / PERDES	990	330	330	330	330	340	340	BPMDPKB			3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				
				4	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	%	RPJMDes / RKPDes	50	50	60	65	70	75	75	BPMDPKB			4	Program peningkatan infrastruktur perdesaan				
				5	Jumlah Peraturan Desa	Jenis	Adanya PERDES	3	4	5	6	7	8	8	BPMDPKB			5	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				
				6	Laporan Keterangan Pertanggungjawabana Kepala Desa	Desa	LPPD 1 Tahunan, 5 Tahunan dan LKPJ Kepala Desa	330	330	330	330	330	340	340	BPMDPKB			6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				
				7	Peningkatan Kapasitas Desa	Persen	Kapasitas aparatur, kelembagaan masyarakat, sarana dan prasarana, keuangan desa dan kapasitas pemberdayaan masyarakat	50	50	60	65	70	75	75	BPMDPKB								
				8	Profil Desa	%	Pengisian Profil Desa, Data potensi dan data perkembangan Desa setiap tahun	5	10	25	50	75	100	100	BPMDPKB								
6	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta meningkatkan layanan kehidupan beragama	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1	Konflik antar umat beragama	Kejadian	Jumlah kejadian konflik antar umat beragama	1	0	0	0	0	0	0	0	Kesra. Setda	1	Peningkatan sumber daya pendidik agama pada lembaga pendidikan agama dan di Mesjid;		Program Peningkatan Kehidupan Beragama			

No.	MISI	TUJUAN		SASARAN				TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN				
				SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PENJELASAN	KONDISI AWAL	2014	2015	2016	2017	2018		KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN	PROGRAM		
					2	Jumlah zakat yang terkumpul	Miliar	Jumlah zakat yang terkumpul	1,40	5	8	11	14	16	16	Kesra. Setda	2	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan agama dan tempat peribadatan;		
					3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per Seribu Penduduk	Jumlah tempat ibadah dibagi jumlah penduduk dikalikan seribu	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012	0,012	Kesra. Setda	3	Mendorong akselerasi terbentuknya masyarakat religius melalui regulasi keagamaan.		
																	4	Peningkatan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama.		

Sekretaris Daerah Kabupaten

Bupati Majalengka

Drs. H. ADE RACHMAT ALI, M.Si

H. SUTRISNO, SE, M.Si